



**Judul** : Komisi VII DPR Dibayangi Gratifikasi  
**Tanggal** : Sabtu, 18 Mei 2013  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

# Komisi VII DPR Dibayangi Gratifikasi

Nasib RUU Antariksa belum jelas. Padahal, Komisi VII DPR baru saja berkunjung ke luar negeri terkait RUU itu. Kini komisi itu pergi lagi.

**ASTRI NOVARIA**

**D**I TENGAH kritikan tajam karena malas menghadiri rapat paripurna DPR, anggota dewan *ngotot* melakukan lagi kunjungan kerja ke luar negeri. Komisi VII DPR mengirim 25 anggotanya ke tiga negara antara Mei hingga Juni terkait penyusunan kebijakan energi nasional.

Tiga negara yang dikunjungi Komisi VII DPR itu adalah China (14-19 Mei), Norwegia (19-25 Mei) dan Selandia Baru (30 Juni-4 Juli). Kunjungan itu dibiayai Dewan Energi Nasional (DEN).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fariel (PPP) menjelaskan kunjungan ke Norwegia karena negara sangat maju akan energi air dan angin. Kunjungan ke China untuk melihat kesiapan negara itu mengelola kekayaan energi.

"Sedangkan ke Selandia Baru karena negara itu sudah mempunyai *blue print* 50 tahun ke depan kebijakan energi," katanya kemarin di Jakarta. Fariel menambahkan biaya kunjungan tersebut ditanggung DEN. "Kami juga sudah lapor KPK," katanya.

Di tempat terpisah Ketua DPR Marzuki Alie tidak memisahkan kunjungan tersebut. "Mereka berangkat atas biaya DEN, sudah dikoordinasikan dengan KPK. Jadi bukan gratifikasi," ujar Marzuki.

Mengenai adanya sejumlah anggota Komisi VII pembolos yang ikut

dalam kunjungan kerja itu, Marzuki mengaku kurang mengetahui.

Dari 25 anggota Komisi VII yang melakukan kunjungan ke luar negeri itu 9 di antaranya ternyata tingkat kehadiran mereka di rapat paripurna dewan di bawah 50%.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan kunjungan ke tiga negara itu menghabiskan dana sekitar Rp2 miliar. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Fitra Uchok Sky Khadafi.

## Tidak efektif

Kunjungan kerja ke luar negeri di tahun terakhir masa jabatan DPR dinilai tidak efektif. Apalagi, sejumlah RUU belum selesai dibahas karena tingkat kehadiran anggota yang rendah.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan di tengah kenyataan banyaknya anggota dewan yang membolos rapat-rapat DPR, kunjungan kerja Komisi VII DPR ke tiga negara itu dirasa tidak pantas. "Bagaimana bisa dijamin bahwa apa yang mereka pelajari di luar negeri itu bisa mereka perjuangkan, kalau datang ke rapat saja jarang," ujar Lucius.

Menurut Lucius, kunjungan Komisi VII DPR yang dibiayai DEN berarti melanggar Tatib Pasal 143 ayat (3) yang menyebutkan bahwa komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pim-